
**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang
Kabupaten Bengkayang**

Selviana Yasinta

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : selvianayasinta@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teori *Good Governance* "UNDP", ada sembilan faktor penting untuk mencapai *Good Governance*. Dari Sembilan faktor ini, penulis hanya membahas tiga faktor saja, karena aspek tersebut lebih relevan dengan fokus penelitian yang penulis angkat yakni tata pemerintahan desa serta fenomena yang terjadi di lapangan. Ketiga faktor tersebut yaitu : Tranparansi, Daya Tanggap, dan Akuntabilitas. Adapun permasalahan mengenai penelitian ini adalah tidak baiknya tata pemerintahan desa, yang mana kurang transparan, bertanggung jawab, dan tanggapnya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana. Lokasi penelitian di Desa Tirta Kencana. Subyek penelitian adalah kepala badan pemberdayaan dan pemerintahan desa , camat, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa serta masyarakat Tirta Kencana. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa tidak tercapainya tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana karena pada pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya aparatur pemerintah desa kurang tranparan, bertanggung jawab dan tanggap, sehingga penyelenggaraan pemerintahannya tidak sesuai dengan tata pemerintahan desa.

Kata Kunci : *good governance*, penyelenggaraan, pemerintah desa, dan tata pemerintahan. .

Abstract

This research uses a qualitative method that uses the theory of Good Governance "UNDP", there are nine important factors to achieve good governance. Of nine of these factors, the author discusses only three factors because they are relevant to the focus of the research that the functioning of the village government and the phenomena that occur in the field. These three factors are: Transparency, Responsiveness, and Accountability. The problem of this study is the procedure of the village is not working, which is less transparent, accountable, and the response of the village government in carrying out their roles, responsibilities and functions of governance at the village in the village of Tirta Kencana. Research sites in the village of Tirta Kencana. Subjects were heads of government agencies and the empowerment of village, district, village heads, village, village and community consultative body Tirta Kencana. The conclusion of this study is the failure to achieve good governance in village governance in the village of Tirta Kencana because the performance of duties, responsibilities and functions of the government apparatus village less transparent, accountable and responsive, so that the implementation of the government was not in suitable with good governance.

Keywords: good governance, administration, village government, and work procedures.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa memberi peluang bagi desa untuk menjalankan otonomi desa secara luas dan mandiri di daerah, karena betapa pentingnya desa sebagai lembaga terkecil di dalam pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, serta menjadi suatu tolok ukur bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana merupakan suatu bentuk penugasan maupun pendelegasian yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tirta Kencana, dalam rangka menyelenggarakan otonomi desa agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap kemajuan daerah Kabupaten Bengkayang, terutama dalam melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan di daerah Kabupaten Bengkayang secara mandiri. Pelaksanaan otonomi desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik di Desa Tirta Kencana. Salah satu pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan daerah tersebut

mencakup tugas, pokok dan fungsi pemerintah desa serta tata kerja pemerintah desa.

Tata kerja pemerintah desa di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 ini merupakan pedoman aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa di Desa Tirta Kencana, yang mana didalamnya sudah jelas tugas, pokok dan fungsi pemerintah desa terutama kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat desa, agar mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala desa di dalam peraturan tersebut adalah sebagai alat pemerintah, alat perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten di tingkat desa, sebagai pelaku utama guna meningkatkan kemajuan desa pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi motor penggerak utama dalam membangun daerah. Untuk itu, apabila kepala desa dan perangkat desa Tirta Kencana tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kemungkinan besar aparatur desa di Kantor Desa Tirta Kencana sulit memahami dengan baik tata kerja pemerintah desa, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tersebut.

Belum dipahaminya tata pemerintahan desa tersebut terlihat dari adanya indikasi aparatur desa atau Pemerintah Desa Tirta Kencana belum bisa melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan optimal, yaitu pada pelaksanaan tugas dan kewajibannya, kepala desa semestinya harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan

Permusyawaratan Desa, dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa tersebut disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada akhir tahun anggaran, tetapi pada kenyataannya kepala desa Tirta Kencana menyerahkan laporan pelaksanaan tugas yang telah dijalankannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau sering kali terlambat. Indikasi tersebut diperkuat oleh pengakuan Camat Bengkayang pada saat peneliti melakukan *pre survey* di Kantor Camat Bengkayang, bahwa saat ini memang kepala desa Tirta Kencana belum pernah melaporkan laporan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugasnya.

Kurang lengkapnya administrasi kependudukan desa Tirta Kencana juga terlihat tidak adanya data yang akurat mengenai data penduduk masyarakat setempat yang berwujud profil desa ataupun monografi desa, yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing desa, hal tersebut menyebabkan camat selaku kepala wilayah ataupun pejabat yang berwenang di wilayah Kecamatan Bengkayang sulit untuk mengakumulasi data desa se-kecamatan Bengkayang di dalam data kecamatan Bengkayang dalam angka, sehingga untuk memperoleh informasi yang mendukung hal tersebut pemerintah kecamatan Bengkayang harus turun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan. Pentingnya profil desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat berguna untuk mengetahui potensi-potensi mengenai desa, agar dengan terbukanya informasi tersebut dapat membantu pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, kecamatan maupun pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan. Profil desa juga sangat bermanfaat dalam penyusunan rancangan maupun evaluasi pada pelaksanaan pembangunan di kecamatan Bengkayang.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kantor Desa Tirta Kencana, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur desa di seluruh Kabupaten Bengkayang tidak hanya sebatas pada kelengkapan administrasi kependudukan dan pelaporan saja, namun beberapa hal teknis lainnya seperti kinerja aparatur desa juga sangat mempengaruhi berjalannya roda pemerintahan di desa. Hal-hal yang sering kali menjadi sorotan masyarakat yang berkenaan dengan kinerja tersebut adalah pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat, karena pentingnya pelayanan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah merupakan suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa pada pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Salah satu bentuk pelayanan yang tidak bertanggung jawab pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana dalam hal ini adalah, berawal dari tidak adanya tanggung jawab dari perangkat desa seperti sekretaris desa dan kepala urusan baik itu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan umum di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat ketika ingin mengurus administrasi masyarakat mesti mendatangi kepala desa di rumahnya, karena selain pelayanan dilakukan di rumah, kepala desa juga melayani masyarakat seorang diri, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan kepala desa secara merangkap. Tentunya hal tersebut sangat memberatkan kepala desa, karena seharusnya kepala desa yang semestinya dibantu oleh perangkat desa dalam hal pelayanan administrasi, justru harus bekerja sendiri untuk melayani masyarakat. Tidak adanya partisipasi perangkat desa pada penyelenggaraan pemerintahan desa

ini, merupakan bentuk dari tidak terlaksananya tugas, pokok dan fungsi perangkat desa yang bertanggung jawab dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya kinerja aparatur pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Desa Tirta Kencana

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan permasalahan ini adalah Bagaimana tata pemerintahan Desa Tirta Kencana dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui bagaimana Transparansi Pemerintah Desa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.
2. Ingin mengetahui bagaimana Daya Tanggap Pemerintah Desa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.
3. Ingin mengetahui bagaimana Akuntabilitas kerja Aparat Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi pemerintah Desa Tirta Kencana, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Desa, untuk mewujudkan tata pemerintahan Desa yang baik

di Kantor Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, serta dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Desa Tirta Kencana, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dilandasi dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Terbentuknya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diyakini dapat mengatasi *problem* pembangunan ekonomi ditingkat lokal. Keyakinan ini bermula dari dua hal, yaitu pemerintahan yang baik selalu bersandar pada transparansi dan akuntabilitas publik (Nugroho, 2001:4). Pendapat yang dikemukakan oleh Archer dikutip oleh Nugroho menyatakan bahwa pemerintahan yang baik cenderung didasarkan pada beroperasinya tiga kekuatan, yaitu negara yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat *civil* yang mandiri (Archer dalam Nugroho, 2001:4).

Konsep *good governance* yang dikutip oleh Sjamsuddin bahwa dalam *good governance* tidak lagi pemerintah (*state*), tetapi madani (*civil society*) dan terutama sektor swasta (*privat sector*) yang berperan dalam kepemimpinan (*governance*). Hal ini juga karena adanya perubahan paradigma pembangunan, dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu ini bisa dilakukan, apabila masyarakat dan

sektor swasta sendiri sudah semakin berdaya (Sjamsuddin, 2010:50)

Pendapat Tussman yang dikutip oleh Sjamsuddin juga menyatakan bahwa :

“*Governance non by the best among all of us but by the best whitin each of us*”. Maksudnya adalah : pemerintahan itu dilaksanakannya sebaiknya bukan oleh orang-orang yang terbaik diantara para aparatur negara, tetapi justru oleh kemampuan terbaik dari setiap individu aparatur negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan konsekuensi dari suatu sistem administrasi publik yang secara seutuhnya berfungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Istilah *governance* secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarah, pembinaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *building*. *Governance* adalah suatu proses dalam mana suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi kompleks lainnya dikendalikan dan diatur sebagaimana diungkapkan oleh Puque yang dikutip oleh Sjamsuddin yaitu “*it is process through which a sosio-economic or any other complex organization is steered*” (Puque dalam Sjamsuddin, 2010:51). Kemudian pendapat Pinto yang dikutip oleh Sjamsuddin juga mendefinisikan *governance* sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya (Pinto dalam Sjamsuddin, 2010:51).

Menurut Bhatta yang dikutip oleh Sjamsuddin secara umum *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) (Bhatta dalam Sjamsuddin, 2010:55). Terhadap keempat unsur

tersebut Admulekun dan Bryant yang dikutip oleh Sjamsuddin menambahkan dua unsur lainnya yaitu kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human rights*). Hak-hak asasi manusia pada dasarnya merupakan bagian bagian dari unsure *governance* (meskipun pada tingkatan pengertian umum atau global), sedangkan kompetensi manajemen lebih cenderung merupakan akibat atau gejala (*symptom*) dari adanya *good governance* daripada sebagai bagian dari unsur utama.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan rinci seluruh hal yang berkenaan dengan fenomena yang terjadi di lapangan .

Subjek pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain : Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkayang, Camat Bengkayang, Kepala desa Tirta Kencana, Perangkat Desa Tirta Kencana, Badan Permusyawaratan Desa Tirta Kencana dan masyarakat Tirta Kencana serta Sekretaris desa Bhakti Mulya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

Pada penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, baik dalam hal pelayanan administrasi yang merupakan bagian dari tugas, pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa, maupun kewajiban dan kewenangan desa lainnya yang merupakan tanggung jawab pemerintah desa tersebut. Kedudukan Kepala Desa sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah sebagai alat pemerintah, alat perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sedangkan perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut.

Salah satu fungsi kepala desa yang berkenaan dengan fungsinya adalah melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu bertanggung jawabnya kepala desa kepada rakyat melalui BPD dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 hal tersebut merupakan bagian dari tata kerja pemerintah desa. Untuk mencapai terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik, perlu adanya pemahaman dan tanggung jawab dari aparatur pemerintah desa bersama BPD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Oleh karena itu perlu diterapkan adanya transparansi kerja, daya tanggap dari aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta akuntabilitas (tanggung jawab)

pemerintah desa terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga terwujudnya tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Tirta Kencana apabila seluruh elemen baik itu pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa bersama BPD serta masyarakat, dapat bekerja bekerja sama dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pelayanan prima dari aparatur pemerintah desa kepada masyarakat, yaitu dengan menunjukkan sikap dan cara yang baik agar terwujudnya kepuasan dari masyarakat akan pelayanan yang diberikan.

Pada kenyataannya fenomena di lapangan berbeda dengan apa yang seharusnya di lakukan, yang mana Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana belum transparan, fenomena tersebut dapat dilihat dari tidak tersedianya data-data mengenai desa tersebut, serta penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dilakukan di kantor desa. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah desa Tirta Kencana tidak mengerti tugas, pokok dan fungsinya dalam menjalankan kewenangan desa.

Pada pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pemerintahan desa, perangkat desa tidak memiliki daya tanggap dan belum memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana tidak sesuai dengan tata pemerintahan desa, sehingga sulit untuk mencapai tata pemerintahan yang baik di desa tersebut.

2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, peneliti mengalami banyak hambatan dalam melaksanakan penelitian, sehingga banyak kekurangan yang terjadi skripsi ini belum dapat mencapai kesempurnaan. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

- a. Teori yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan seluruh permasalahan secara rinci yang terjadi di lapangan.
- b. Kurangnya literatur mengenai konsep-konsep ataupun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Camat Bengkayang dan Kepala Desa Tirta Kencana, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku Bacaan

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Belajar : Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. LIPI Press : Jakarta
- Institut For Research and Empowerment. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. IRE Press : Yogyakarta.
- Kecamatan Bengkayang Dalam Angka tahun. 2012. Koordinator Statistik Kecamatan Bengkayang : Bengkayang
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT

Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Profil Kecamatan Bengkayang Tahun 2012.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju : Bandung

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2010. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Agritek YPN Malang : Malang.

Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.

....., 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

....., 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.

Tohardi, A. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju : Bandung.

Widjaja, HAW. 1992. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Workshop Kerjasama Program (S-2) Politik Lokal & Otda dan S-2 Sosiologi UGM dengan partnership for Governance Reform. 2001. *Desentralisasi dan Good Governance di Tingkat Desa*. Entang Adhy Muhtar : Yogyakarta.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SELVIANA YASINTA
NIM / Periode lulus : E42009045/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : selvianayasinta@gmail.com / 085245900207

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TIRTA KENCANA
KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013


(SELVIANA YASINTA)